

BPK Ungkap Kerugian Kabupaten Wajo

Terjadi kerugian daerah sebesar Rp 271,4 juta.

WAJO — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan sedikitnya tujuh *item* dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2009.

Salah satunya terjadi kerugian daerah sebesar Rp 271,4 juta. Ini terungkap dalam laporan BPK tanggal 21 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Nursiska Ria, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan.

Menanggapi temuan tersebut, Andi Witman Hamsah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo sekaligus Sekretaris

Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Perbendaharaan, membenarkan hal itu.

Menurut dia, sesuai dengan rekomendasi yang ada, pihaknya kini telah melakukan tindak lanjut. "Jadi, untuk sekarang ini, rekomendasi itu masih ditangani oleh Tim Tindak Lanjut, yang diketuai oleh Wakil Bupati."

Meski begitu, Witman menambahkan, setiap temuan tidak harus langsung dikembalikan karena memerlukan proses. "Temuan itu akan dirapatkan dulu dengan BPK, kemudian ditindaklanjuti."

Sementara itu, Ketua Tim Tindak Lanjut yang juga Wakil Bupati, Amran Mahmud, mengungkapkan hal serupa. "Kami sudah menindak-

lanjuti semua temuan itu, termasuk berkoordinasi dengan semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Untuk pengembaliannya, bisa dilakukan dengan mengangsur sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Menurut Amran, kesalahan terjadi akibat salah persepsi dari SKPD dalam melihat aturan yang ada. "Misalkan uang pungut pajak kami terbitkan surat keputusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ternyata, menurut BPK, harus ada dasar yang harus dilakukan, sehingga menjadi temuan," ucapnya.

Agar tidak terulang kejadian serupa di masa mendatang, Amran berjanji akan melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD dan me-

neliti kembali perhitungan yang dibuat. "Karena ada yang salah dalam perhitungan," katanya.

M. Sabri F., BA, anggota Badan Pekerja Wajo Anti-Corruption Committee, kepada *Tempo*, mendesak agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. "Itu wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di sisi lain, DPRD wajib mengawasi pemda dalam tidak lanjut tersebut," ucapnya.

Sabri menyarankan, seharusnya hasil pemeriksaan itu dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah Wajo atau melalui siaran pers agar publik tahu serta ikut melakukan pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK itu.

"Untuk itu, kami mendesak agar hasil pemeriksaan BPK untuk Wajo sejak 1999 sampai sekarang dipublikasikan. Jangan dianggap itu rahasia negara, karena itu adalah dokumen publik," kata Sabri.

Selain itu, Sabri melanjutkan, sudah banyak rekomendasi BPK yang berulang yang tidak ditindaklanjuti. Ia mencontohkan penghentian bantuan uang dan lainnya kepada penegak hukum.

Tapi, yang perlu diingat, kata Sabri, undang-undang telah mengatur tentang hasil pemeriksaan tersebut. "Jadi aparat penegak hukum tidak boleh serta-merta melakukan pemeriksaan terhadap hasil audit BPK itu." ● ANDI PAJUNG

DPRD Belum Terima Laporan Akhir Jabatan Bupati Bulukumba

MAKASSAR — Masa jabatan Bupati Bulukumba A.M Syukri Sappewali dan wakilnya, H. Padas, akan berakhir pada 6 September mendatang. Tapi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir jabatannya belum juga diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Padahal, menurut Undang-undang, LKPj harus sudah dibahas paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. "LKPj lima tahunan seharusnya sudah kami bahas," kata Kahar Muslim, Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, kemarin.

Menurut Kahar, selama ini pembahasan LKPj tahunan dan laporan semester anggaran pendapatan dan belanja daerah selalu terlambat dibahas di DPRD. Penyebabnya, pihak eksekutif kerap telat memasukkan datanya.

"Kami berikan lagi *deadline* dua hari setelah rapat dengan pihak keuangan dan tim TAPD hari ini (kemarin) untuk merampungkan dan menyerahkan laporan penggunaan APBD tahun ini," katanya.

DPRD Bulukumba sebenarnya telah mengirimkan surat kepada pihak eksekutif agar LKPj lima tahunan bupati dimasukkan untuk dibahas. Tapi sampai saat ini belum ada respons.

Selain merampungkan laporan APBD, rapat membahas kenaikan anggaran KNPI Bulukumba dari Rp 15 juta menjadi Rp 25 juta dan menyetujui penambahan dana anggaran pilkada putaran kedua.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bulukumba, Mulyadi Mursali, mengatakan rapor pemerintah merah karena pembahasan LKPj selalu terlambat. "Kami di DPRD sebenarnya bisa melakukan pembahasan laporan hanya dalam tiga hari," katanya.

Daud Kahal, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bulukumba, mengaku pihaknya masih merampungkan data LKPj. "Dalam waktu dekat, kami akan menyerahkannya. Yang pasti, sebelum masa jabatannya habis," katanya.

Daud mengatakan semua satuan kerja perangkat daerah masih dalam tahap menyusun laporan. "Kami tidak tahu-menahu kalau ada laporan semester penggunaan APBD. Mungkin itu pihak keuangan yang tahu." ● JASMAN



HARIANDI HAFID (TEMPO)

Tuntut Polisi

Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar aksi unjuk rasa dengan membakar ban bekas di Jalan Urip Sumahardjo, Makassar, kemarin. Mereka menuntut keseriusan polisi dalam mengusut kasus penganiayaan terhadap seorang aktivis UMI, yang diduga melibatkan anggota TNI, pada Kamis lalu. Aksi ini menimbulkan kemacetan lalu lintas.

PGRI dan IGI Sulawesi Selatan Berebut Anggota

MAKASSAR — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Selatan melarang anggotanya bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI). Sebab, menurut mereka, organisasi ini belum diakui pemerintah.

"Kami harus melindungi semua anggota kami agar tidak mudah pindah organisasi," kata Nasir Mas'ud, Wakil Ketua Bidang Keorganisasian PGRI Sulawesi Selatan, saat dihubungi *Tempo* kemarin.

Kebijakan itu langsung menuai protes. Muhammad Asmin, pengurus IGI, menyayangkan hal tersebut. "Ini bertentangan dengan undang-undang, yang memberikan keleluasaan bagi guru untuk bergabung dengan

organisasi mana pun," kata dia saat berkunjung ke kantor *Tempo* Makassar, Sabtu lalu.

Pelarangan oleh PGRI bagi anggotanya itu lantaran legitimasi IGI, yang dibentuk pada 25 Juli 2009 di Makassar, masih dipertanyakan. "Organisasi yang terdaftar di Badan Kesatuan sudah pasti diakui keberadaannya," kata Nasir.

Menurut dia, organisasi guru yang selama ini diakui hanya PGRI. "Dari pusat hingga ke daerah, organisasi guru yang diketahui masyarakat hanya PGRI."

Padahal, menurut Asmin, keberadaan IGI sebagai organisasi profesi telah mendapatkan pengakuan baik secara *de facto* maupun *de jure* oleh Kement-

rian Pendidikan Nasional. "PGRI bukan satu-satunya organisasi profesi guru. Itu yang mesti dipahami secara tekstual dan kontekstual," katanya.

Nasir mengklaim PGRI selama ini telah berhasil memperjuangkan kepentingan guru, di antaranya program sertifikasi. "Adanya sertifikasi membuat guru sudah bisa terima gaji dan tunjangan di atas Rp 5 juta per bulan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Antarlembaga Badan Kesatuan Bangsa Sulawesi Selatan Muhammad Hardi menyatakan bahwa kedua lembaga guru itu harus saling menghargai. "Jangan ada yang mengklaim organisasi lain tidak diakui."

Dia menilai larangan PGRI kepada anggotanya agar tidak pindah organisasi merupakan langkah yang tidak demokratis. "Hukum mengatur warga negara bebas berkumpul dan berseikat dalam sebuah organisasi," katanya.

I Ketut Bhuwana, Sekretaris IGI, mengatakan organisasi ini lahir dari kalangan guru muda yang menginginkan perubahan mendasar pada kompetensi guru secara umum di Tanah Air.

Kisruh yang mendera dua organisasi profesi ini berawal ketika sebagian anggota PGRI, yang merupakan guru muda, mendeklarasikan terbentuknya Ikatan Guru Indonesia.

● ARIFUDDIN KUNU | INDRA O Y